

Pengembangan Regulasi dan Lingkungan Investasi untuk Mempercepat Penyediaan Investasi dan Pendanaan Hijau yang Mendukung Sektor Industri dalam Mengimplementasikan Transisi Energi

Lishia Erza

Wakil Ketua

Komite Tetap Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional,

Bidang Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.



Pengembangan Regulasi dan Lingkungan Investasi untuk Mempercepat Penyediaan Investasi dan Pendanaan Hijau yang Mendukung Sektor Industri dalam Mengimplementasikan Transisi Energi

Indonesia tercatat memiliki total:

42 ribu Peraturan:

**8 ribu peraturan pusat (UU, Perpu, PP, Perpres),
13 ribu peraturan menteri,
3 ribu peraturan lembaga non kementerian
15 ribu peraturan daerah**

(sumber: peraturan.go.id).



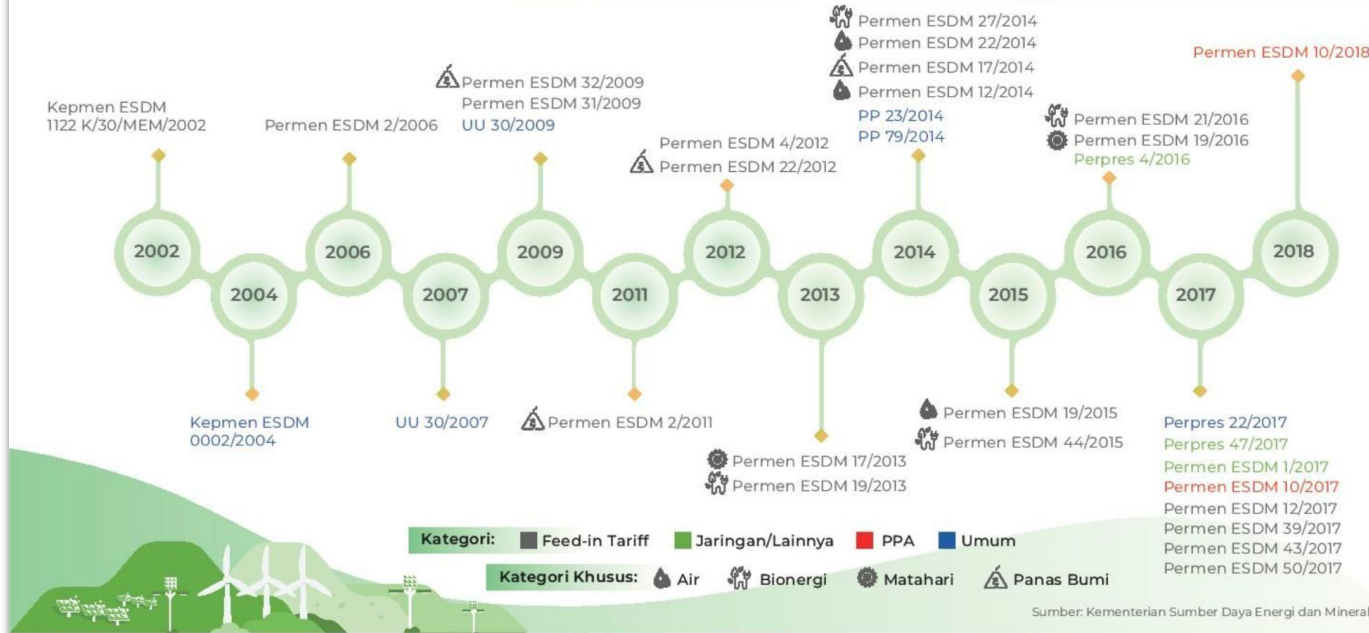
41 Peraturan EBTKE,
12 Aturan pajak...

DINAMIS vs. KETIDAKPASTIAN?

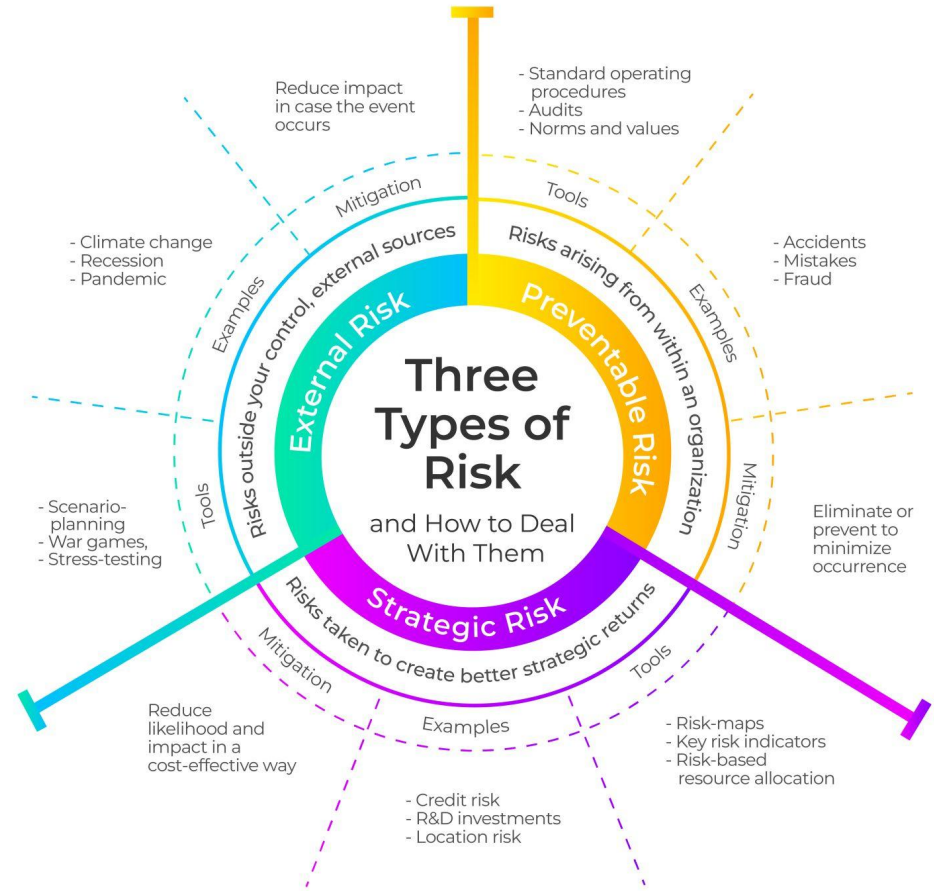


Dinamika Regulasi Terkait Listrik, Akses Listrik, dan Energi Terbarukan

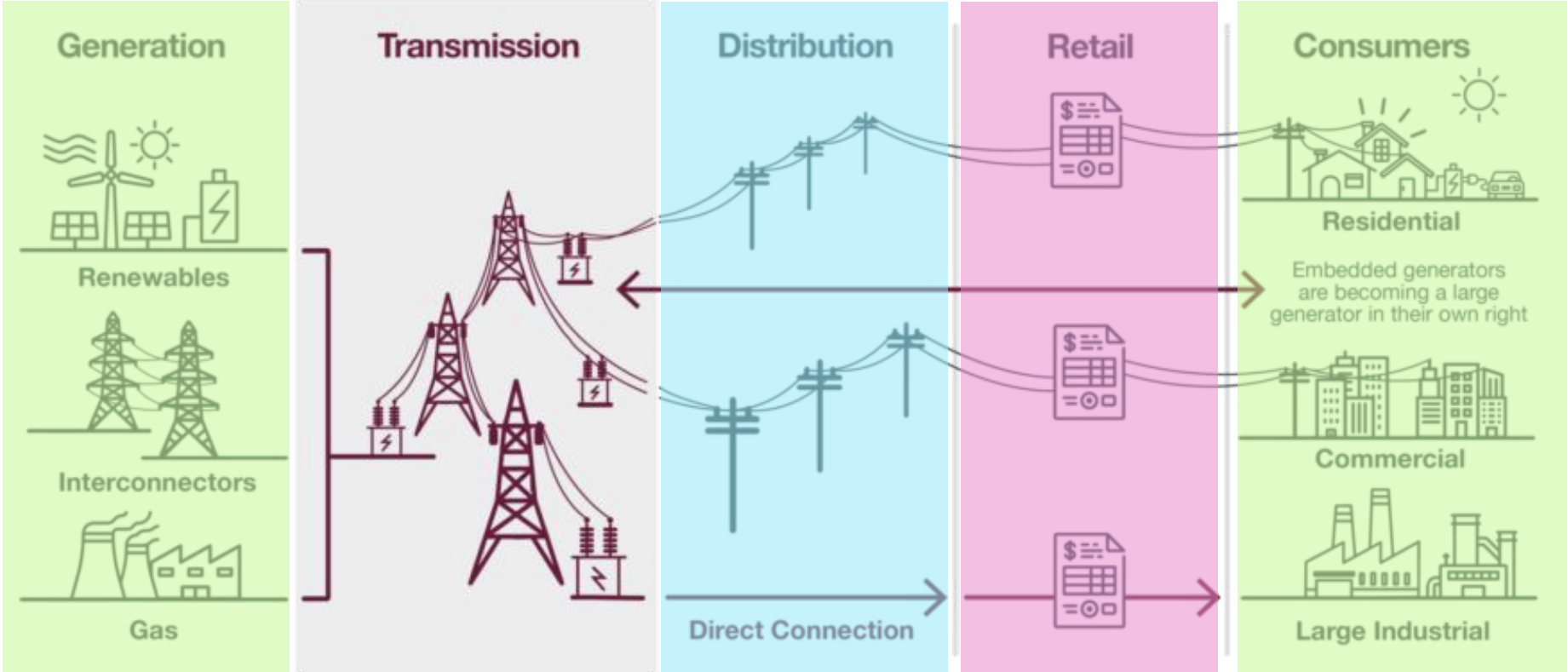
Perubahan regulasi yang signifikan meningkatkan ketidakpastian dan risiko pembangunan energi terbarukan di Indonesia



Pengembangan
Regulasi dan
**Lingkungan Investasi
untuk Mempercepat
Penyediaan Investasi
dan Pendanaan Hijau**
yang Mendukung
Sektor Industri dalam
Mengimplementasikan
Transisi Energi



Supply Chain View: Lihat sebelah mana?



PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS



Industri Pangan



Industri Farmasi,
Kosmetik dan
Alat Kesehatan



Industri Tekstil,
Kulit, Alas Kaki
dan Aneka



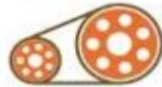
Industri
Alat Transportasi



Industri Elektronika
dan Telematika (ICT)



Industri
Pembangkit Energi



Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan Peno-
long dan Jasa Industri



Industri Hulu Agro



Industri Logam Dasar
dan Bahan Galian
Bukan Logam



Industri Kimia Dasar
Berkas Migas dan
Batubara

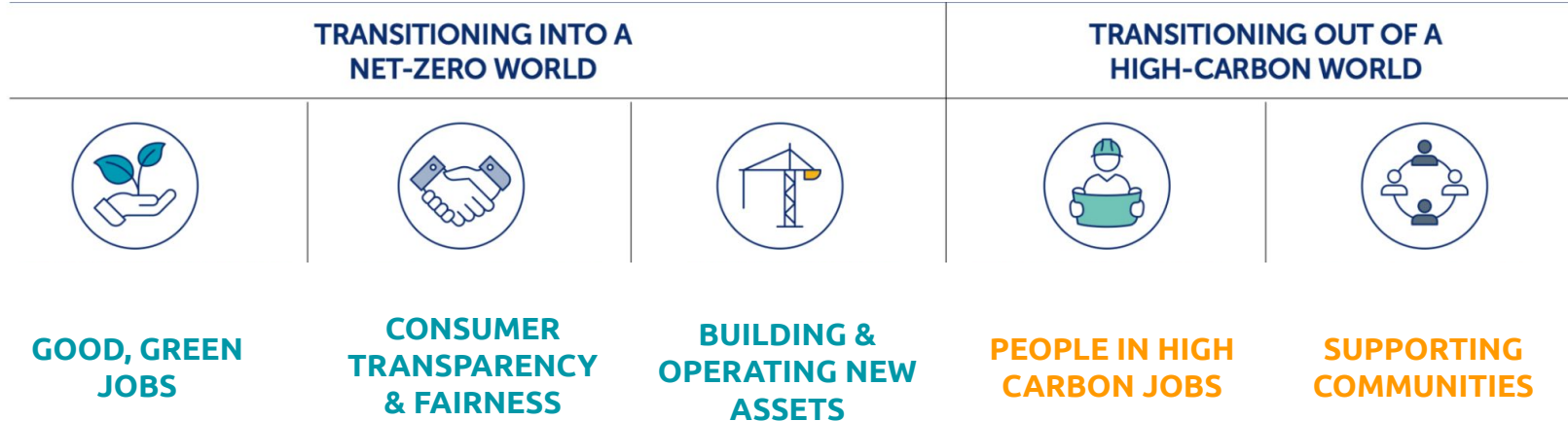


IKM, Kerajinan, dan
Industri Kreatif

Pengembangan
Regulasi dan
Lingkungan Investasi
untuk Mempercepat
Penyediaan Investasi
dan Pendanaan Hijau
**yang Mendukung
Sektor Industri** dalam
Mengimplementasikan
Transisi Energi

Pengembangan Regulasi dan Lingkungan Investasi untuk
Mempercepat Penyediaan Investasi dan Pendanaan Hijau
yang Mendukung Sektor Industri dalam
Mengimplementasikan Transisi Energi

TRANSISI BERKEADILAN (JUST TRANSITION)



Pengembangan Regulasi dan Lingkungan Investasi untuk Mempercepat Penyediaan Investasi dan Pendanaan Hijau yang Mendukung Sektor Industri dalam Mengimplementasikan Transisi Energi

Lishia Erza

Wakil Ketua

Komite Tetap Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional,

Bidang Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.



Peraturan EBTKE

Peraturan-Peraturan Tentang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Panas Bumi

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi Yang Berasal Dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract)
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT. PLN (Persero)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Panas Bumi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Dan Serbuk Bor Pada Pemboran Panas Bumi
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rekonsiliasi, Penyetoran, Pengenaan Dan Tata Cara Penetapan Presentase Daerah Penghasil Atas Besaran Bonus Produksi Panas Bumi
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Penugasan Perusahaan Panas Bumi Dan Penerbitan Izin Panas Bumi

LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi)

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Listrik

Pembangkitan Listrik dari Energi Terbarukan

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pump Upper Cisokan 4x260 MW
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Listrik
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Listrik
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Listrik
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Oleh Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN)
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Bioenergi

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Konservasi Energi

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Energi
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Energi
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Energi
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swablast
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum Dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi Untuk Peranti Pengkondisi Udara

Peraturan Lainnya

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi
2. Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil

Regulasi Mengenai Pajak Penghasilan (PPh)

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) tentang pembayaran atas penyerahan barang serta kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan ini merupakan perubahan kelima dari PMK Nomor 15 tahun 2010. Ketentuan yang telah diubah dalam peraturan perpajakan tersebut yakni terkait subjek pemungut pajak serta besaran pemungutan pajaknya.

Regulasi Mengenai Pembayaran Pajak

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 - kebijakan-kebijakan ketika melakukan pembayaran pajak secara elektronik dalam hal ini menggunakan aplikasi e-Billing.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

Regulasi Mengenai PPN dan PPnBM

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dimana Undang-Undang ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari [Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000](#).
- PMK Nomor 32/PMK.10/2019 batasan kegiatan jenis Jasa Kena Pajak (JKP)

Regulasi Mengenai Bea Meterai

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai bea meterai

Regulasi Mengenai Tentang SPT

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Peraturan ini telah mengalami perubahan dari [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 01/PJ/2016](#).

Regulasi Perpajakan Lainnya

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dimana peraturan ini mengalami perubahan sebanyak 2 kali yakni dari [PP No. 77 Tahun 2013](#) dan [PP No. 56 Tahun 2015](#).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 oran.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 07 Oktober 2021 serta telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menjadi [UU Nomor 7 Tahun 2021](#) pada 29 Oktober 2021.

Terkait revisi dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Adapun, hal-hal mengenai pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini ialah:

- Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 3
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pasal 4
- Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pasal 5-12
- Pajak Karbon, Pasal 13
- Cukai, Pasal 14
- Ketentuan Peralihan, Pasal 15
- Ketentuan Penutup, Pasal 16-19.